

**EFEK MODERASI KETEPATAN WAKTU PADA PENGARUH  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL DAN TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI TERHADAP OPINI AUDIT  
LAPORAN KEUANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh :

**RIZKI FANI SABELLA**

**NIM : 4318021**

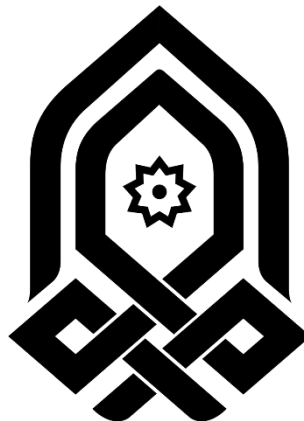
**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2022**

**EFEK MODERASI KETEPATAN WAKTU PADA PENGARUH  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL DAN TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI TERHADAP OPINI AUDIT  
LAPORAN KEUANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh :

**RIZKI FANI SABELLA**

**NIM : 4318021**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Fani Sabella

NIM : 4318021

Judul Skripsi : **Efek Moderasi Ketepatan Waktu Pada Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan.**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Februari 2022  
Yang menyatakan,



Rizki Fani Sabella

## NOTA PEMBIMBING

**Ina Mutmainah, M.Ak**

Bligo No. 35 RT 003 RW 001, Buaran, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rizki Fani Sabella

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Rizki Fani Sabella**

NIM : **4318021**

Judul Skripsi : **Efek Moderasi *Timeliness* Pada Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta**

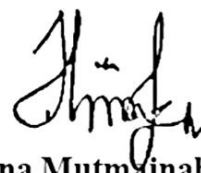
Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 15 Februari 2022  
Pembimbing,



**Ina Mutmainah, M.Ak**

NIP 19920331 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BSINIS ISLAM  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, [www.febi.iainpekalongan.ac.id](http://www.febi.iainpekalongan.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Rizki Fani Sabella  
NIM : 4318021  
Judul Skripsi : Efek Moderasi Ketepatan Waktu Pada Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan

Telah diujikan pada hari Selasa & Kamis, 22 & 24 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)

Dewan Penguji,

Penguji I

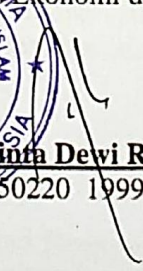
Penguji II

  
Agus Arwani, SE, M.Ag., ORMP  
NIP 19760807 201412 1 002

  
Novendi Arkham Muhtadi, M.Akun  
NIP 19891103 201908 1 001



Pekalongan, 30 Maret 2022  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Hj. Sinta Devi Rismawati  
NIP 19750220 199903 2 001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SW yang telah memberi limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penyusun menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Penyusun persembahkan karya ini sebagai ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berperan membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Mama, Abah, dan Nenek tercinta, Rini Astuti, Mustofa Ali, dan Kiptiyah, atas dukungan, do'a, motivasi, serta kasih sayang sehingga penulis tidak kehilangan semangat dan keyakinan dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kedua adikku yang berharga, Guntur Pangestu dan Najwa Surya Ilmira atas segala hiburan selama penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing terbaik, Ibu Ina Mutmainah, M.Ak, atas bimbingan, nasehat, dan do'a selama penyusunan skripsi ini.
4. Almameter jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Para teman dan sahabat yang berharga, Sela, Yasmin, Rafita, Muti, Via, Alfi, Hany, dan Lala atas dukungan, bantuan, dan hiburan selama penyusunan skripsi ini.
6. Member EXO, NCT, Treasure, DAY6, dan Seventeen, atas energi positif yang diberikan melalui kata-kata dan karyanya.
7. Diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan dan menyelesaikan skripsi ini, *you're doing a really great job, Bell!*

## **MOTTO**

*But Allah is your protector, and He is the best of helpers.*

Q.S. Ali-imran:150

*And Allah is the best of planners.*

Q.S. Al-Anfal: 30

*Lucky only comes to those who work hard,  
giving up make you won't even have a chance.*

Treasure Jihoon

*Start now. Just start.*

*Writer*

## ABSTRAK

### **RIZKI FANI SABELLA. Efek Moderasi Ketepatan Waktu Pada Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan: Studi Pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pendapat profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk apresiasi atas kualitas laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Opini yang bagus mengindikasikan kewajaran informasi dalam laporan keuangan memadai. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh faktor standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut rekomendasi pada opini audit laporan keuangan pemerintah kabupaten, serta moderasi ketepatan waktu pada pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut rekomendasi pada opini audit laporan keuangan pemerintah kabupaten.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Subjek penelitiannya adalah pemerintah kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel terdiri dari 50 laporan keuangan pemerintah kabupaten tahun anggaran 2018 dan 2019 yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Analisis dan pengolahan data dilakukan dengan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi selisih mutlak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh pada opini audit. Sedangkan tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh pada opini audit. Hasil pengujian moderasi menghasilkan ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pada opini audit. Namun ketepatan waktu tidak mampu memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit.

**Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Tindak Lanjut Rekomendasi, Opini audit, dan Ketepatan waktu**



## **ABSTRACT**

***RIZKI FANI SABELLA. Moderating of Timeliness on the Effect of Government Accounting Standards, Internal Control Systems and Follow-Up Recommendations on Financial Statement Audit Opinions: A Study on District Governments in Central Java and Special Region of Yogyakarta.***

*The audit opinion on local government financial statements is a professional opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) as a form of appreciation for the quality of the accountability reports presented by local governments regarding the administration of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). A good opinion indicates the fairness of the information in the financial statements is adequate. This study discusses the influence of government accounting standards, internal control systems, and follow-up recommendations on district government financial statement audit opinions, as well as timeliness moderation on the effect of government accounting standards, internal control systems, and follow-up recommendations on audit opinions of local government financial statement.*

*This research is a quantitative research with secondary data. The research subject is the Regency Government in Central Java and the Special Region of Yogyakarta. The sample consists of 50 local government financial reports for the 2018 and 2019 which were selected through the purposive sampling method. Data analysis and processing was carried out with multiple regression analysis and absolute difference moderating regression analysis.*

*The results of the study indicate that government accounting standards and internal control systems have an effect on audit opinion. Meanwhile, the follow-up to the recommendations does not affect the audit opinion. The results of the moderation test resulted is timeliness being able to moderate the effect of government accounting standards and internal control systems on audit opinions. Minewhile, timeliness is not able to moderate the effect of follow-up recommendations on audit opinion.*

***Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control System, Follow-up Recommendations, Timeliness and Audit Opinion***

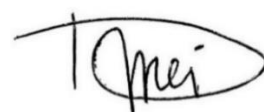
## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Penyusun menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, Sh., MH. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan.
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan.
4. Ade Gunawan M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah M.S.A. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan.
6. Ina Mutmainah, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan skripsi ini.
7. Ade Gunawan M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu dan staf serta pegawai yang telah banyak membantu.
9. Bapak Agus Arwani, M.Si dan Bapak Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun selaku penguji ujian skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan. Dan semoga skripsi ini dapat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 23 Februari 2022



Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN LITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Landasan Teori.....	14
B. Telaah Pustaka.....	21
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Setting Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Variabel Penelitian.....	40
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48

A.	Statistik Deskriptif dan Distribusi Frekuensi .....	48
B.	Uji Asumsi Klasik .....	49
C.	Analisis Regresi Berganda .....	54
D.	Analisis Moderasi Selisih Mutlak .....	56
E.	Pembahasan .....	60
BAB V	PENUTUP.....	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Keterbatasan Penelitian .....	70
C.	Implikasi Teoritis dan Praktis.....	70
D.	Saran .....	71
DAFTAR	PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN –	LAMPIRAN .....	I
1.	Lampiran 1: Daftar Sampel.....	I
2.	Lampiran 2: Perhitungan Data Tiap Variabel.....	II
3.	Lampiran 3: Keseluruhan Variabel.....	XII
4.	Lampiran 4: Pengujian Untuk Mendeteksi Data Outlier .....	XIV
5.	Lampiran 5: Uji Statistik Deskriptif .....	XIV
6.	Lampiran 6: Uji Normalitas .....	XV
7.	Lampiran 7: Uji Multikolinearitas Dengan Uji Korelasi Parsial	XIV
8.	Lampiran 8: Uji Auto Korelasi dengan Uji <i>Runs Test</i> .....	XVII
9.	Lampiran 9: Uji Heteroskedastisitas dengan Uji <i>White</i> .....	XVII
10.	Lampiran 10: Uji Analisis Regresi Berganda .....	XVIII
11.	Lampiran 11: Uji Analisis Moderasi Selisih Mutlak .....	XIX
12.	Lampiran 12: Uji Sobel.....	XX
13.	Lampiran 13: Uji Jenis Moderasi.....	XXI
14.	Lampiran 14: Surat Pengantar Penelitian .....	XXII

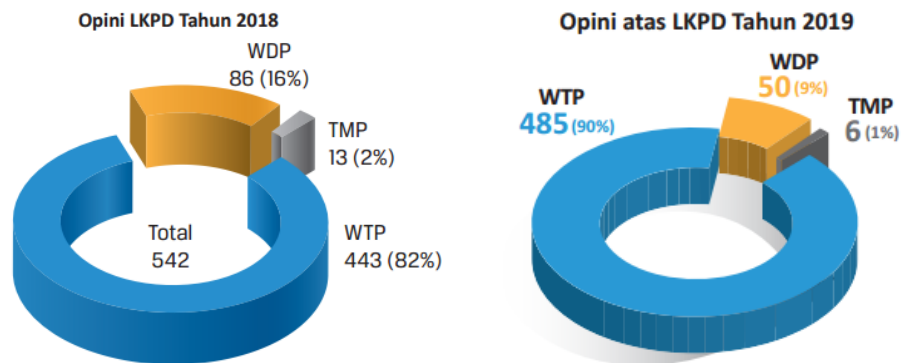
## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat (opini) profesionalnya berkenaan dengan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Tujuannya adalah memberi keyakinan yang memadai mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opininya antara lain; konsistensi standar akuntansi pemerintah, ketaatan pada perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (Amyulianthy et al., 2020).

Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa LKPD di Indonesia mengalami peningkatan kualitas pada tahun anggaran 2018 dan 2019 (HUMAS BPK RI, 2019). Pernyataan tersebut mengacu pada hasil pemeriksaan yang memperlihatkan adanya kenaikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai tingkat opini tertinggi di kalangan pemerintah daerah. Berikut data perolehan opini LKPD di Indonesia:



Sumber : (IHPS BPK Semester I 2019 dan 2020)

Gambar 1.1 Data LKPD di Indonesia peraih opini WTP

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa opini WTP mendominasi LKPD di Indonesia. Opini WTP berhasil diraih oleh 82% LKPD pada TA 2018 dan mengalami peningkatan jumlah menjadi 90% pada TA 2019. Capaian ini melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 (BPK RI, 2020).

Namun disamping mengalami peningkatan, masih terdapat LKPD yang belum memperoleh opini yang baik, atau bahkan mengalami penurunan opini. Dapat dilihat dalam diagram diatas, sebanyak 99 LKPD TA 2018 dan 56 LKPD TA 2019 belum berhasil mendapatkan opini WTP. Selain itu dilansir dari ikhtisar hasil pemeriksaan, terdapat 15 LKPD TA 2018 dan 5 LKPD TA 2019 yang mengalami penurunan opini. Padahal pemerintah daerah dianjurkan untuk meraih opini WTP atau minimal WDP atas laporan pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah menunjukkan keakuntabilisan pemerintah daerah. Melalui

akuntabilitas, diharapkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya daerah akan meningkat.

Dalam pengkajian yang lebih luas, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi opini audit, diantaranya adalah standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kecukupan pengungkapan, jumlah temuan, kepatuhan terhadap regulasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Namun hanya tiga faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu faktor standar akuntansi pemerintah sebab masih minimnya penelitian yang membahas faktor tersebut, lalu faktor sistem pengendalian internal dan tindak lanjut rekomendasi karena masih terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi opini audit adalah standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diaplikasikan pada penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2005). Tujuannya yaitu meningkatkan mutu laporan keuangan. Penerapan SAP memiliki kekuatan hukum karena diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa “Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)”. Dilansir dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, masih banyak akun yang disajikan tidak mengikuti standar akuntansi pemerintah, terutama dalam hal pengakuan aset dan belanja. Menurut pernyataan BPK, hal ini menjadi penyebab umum belum diperoleh opini WTP pada LKPD (Pamungkas et al., 2018). Standar akuntansi pemerintah berperan

untuk meminimalisir adanya salah saji sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan dan dapat memperoleh opini yang baik juga.

Penelitian King et al (2019) menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah mempengaruhi peraian opini audit. Penerapan standar akuntansi pemerintah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas, sehingga dapat menambah kemungkinan untuk mendapatkan opini yang baik. Menurut Cilya et al (2017), standar akuntansi pemerintah memberi pengaruh positif pada opini auditor sebab laporan keuangan yang disusun mengikuti SAP dianggap dapat dipertanggungjawabkan, dan akan berpengaruh baik pada opini audit. Sedangkan Suryanah et al (2021) mengungkapkan SAP dapat memberi dampak yang negatif terhadap opini audit jika tidak diterapkan dengan konsisten dan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Faktor ke dua yang dapat mempengaruhi opini audit adalah sistem pengendalian internal (SPI). Sistem Pengendalian Internal adalah proses pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, kepatuhan terhadap perundangan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan efektif dan efisien (PP No 60 Tahun 2008). Karsana & Suaryana (2017) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut ikhtisar hasil pemeriksaan, BPK menemukan 5.858 temuan permasalahan kelemahan SPI pada LKPD TA 2018 dan jumlah tersebut naik menjadi 6.160 temuan pada LKPD TA 2019. BPK mengungkapkan temuan tersebut dapat



menjadi sebab terjadinya penurunan kualitas opini audit yang diperoleh (IHPS BPK I 2020). Temuan pemeriksaan dapat mengurangi keandalan laporan keuangan, hal ini mempengaruhi opini audit yang akan diperoleh.

Menurut Yaqin & Jatmiko (2018), sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada opini audit. Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah yang ada, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan. Fitriana et al (2020) mengungkapkan banyaknya temuan kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif pada opini audit. Rosadi et al (2017) menarik kesimpulan perubahan opini audit yang semakin menurun adalah sebab dari semakin lemahnya pengendalian internal yang ada. Widodo & Sudarno (2017) menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah adalah faktor tidak diperolehnya opini WTP sebab menyebabkan tidak validnya dokumen dan data yang tersedia. Sedangkan Pamungkas et al (2018) menyimpulkan temuan kelemahan SPI tidak berpengaruh pada opini audit karena nilai temuan kelemahan tersebut tidak material. Alfiani et al (2017) menyebutkan bahwa SPI tidak berpengaruh pada opini karena ada faktor lain yang lebih kuat untuk mempengaruhi opini, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah.

Faktor ketiga yang dapat memberi pengaruh pada opini audit ialah tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi hasil pemeriksaan berisikan masukan untuk melakukan perbaikan atas temuan permasalahan pada laporan keuangan (Lusiana et al., 2017). Tujuannya agar laporan keuangan pemerintah daerah terhindar dari temuan permasalahan berulang sehingga kualitas laporan

keuangan dapat meningkat dan memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan opini yang lebih baik. BPK mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang mengalami kenaikan opini adalah pemerintah daerah yang telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada periode sebelumnya (*IHPS BPK I 2019*).

Menurut Hamidayanti & Wardani (2018), jumlah rekomendasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah memengaruhi penurunan maupun kenaikan perolehan opini. Pemerintah daerah yang telah melakukan tindak lanjut rekomendasi akan terhindar dari temuan permasalahan berulang, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat memperoleh opini audit yang lebih baik. Amyyulianthy et al (2020), opini audit semakin tidak baik jika semakin banyak rekomendasi yang tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sebab dengan tidak dikerjakannya rekomendasi, laporan keuangan dianggap masih mengandung kesalahan-kesalahan. Sedangkan Nusa & Muslihah (2021) mengungkapkan bahwa tindak lanjut rekomendasi cenderung tidak mempengaruhi opini audit. Chadegani & Farsani (2019) mengungkapkan bahwa tindak lanjut rekomendasi dapat tidak berpengaruh pada opini audit karena rekomendasi yang diberikan tidak berilai materialitas.

Pada dasarnya tiga faktor yang telah disebutkan, yaitu: standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut rekomendasi dapat dikatakan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Disebut dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 bahwa suatu laporan dapat dianggap berkualitas jika memenuhi unsur karakteristik kualitatif laporan

keuangan (Yuliani, 2017). Salah satu unsurnya ialah relevan, yakni informasi yang disajikan harus sesuai dengan yang diperlukan (Lestari & Amri, 2020). Untuk memenuhi unsur relevan, laporan keuangan harus disampaikan dengan tepat waktu. Tepat waktu didefinisikan dengan tersajinya suatu informasi pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi suatu keputusan (Widodo & Lutfillah, 2018). Berkaitan dengan hal ini, Sutaryo et al (2020) mengungkap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan interaksi positif dengan kualitas laporan keuangan yang meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan opini audit yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Utara bahwa pemerintah daerah yang terlambat menyetorkan laporan keuangan dipastikan tidak mendapat opini WTP (Neli, 2019). Tuntutan kepatuhan akan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Indonesia tertuang dalam Pasal 56 ayat 3 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau hingga akhir bulan Maret. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti menambahkan ketepatan waktu sebagai variabel moderasi.

Kualitas laporan keuangan yang baik sebagai dasar pengambilan opini salah satunya tercermin dari penerapan standar akuntansi pemerintah yang konsisten. Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan keuangan membawa persepsi yang menambah keyakinan akan kualitas suatu laporan keuangan dengan menjamin unsur relevan atas informasi

yang dikandungnya (Sutaryo et al., 2020). Maka ketepatan waktu dapat memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap opini audit.

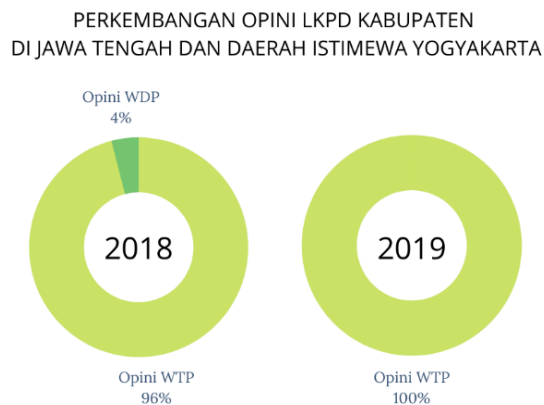
Sistem pengendalian internal yang memadai menandakan keandalan suatu laporan keuangan. Lemahnya sistem pengendalian internal yang ada akan menimbulkan temuan dan mengurangi keandalan laporan keuangan. Penyajian informasi yang tepat waktu mampu meningkatkan keandalan informasi (Dhonal et al., 2018). Dengan ini maka ketepatan waktu dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap opini audit.

Tindak lanjut rekomendasi bertujuan untuk mencapai akuntabilitas laporan keuangan dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sehingga dapat memperoleh opini audit yang maksimal. Fokus utama akuntabilitas laporan keuangan adalah akurat dan tepat waktu (BPKAD, 2017). Dengan kata lain, ketepatan waktu dapat menjadi tanda akan akuntabilitas suatu laporan keuangan. Maka ketepatan waktu dapat memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit.

Penelitian mengenai ketepatan waktu terhadap opini audit oleh Sutaryo et al (2020) menyimpulkan ketepatan waktu berdampak positif terhadap opini audit. Ketepatan waktu mengindikasikan kualitas LKPD yang lebih baik dan akan memperbesar kemungkinan perolehan opini yang baik. Rosadi et al (2017) menyatakan semakin lama laporan keuangan disampaikan, semakin buruk opini yang diperoleh. Ikriyati & Aprilia (2019) mengungkapkan penerapan SAP daerah akan mewujudkan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Menurut Noviani & Hendarsyah (2020), SPI yang tidak diterapkan

dengan baik meperlambat pelaporan keuangan, sebab sistem pengendalian internal yang lemah tidak dapat menyelenggarakan kinerja yang efektif dan efisien. Sedangkan Renwarin & Sumtaky (2019) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu.

Penelitian ini dilakukan dengan subjek pemerintah kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah tersebut dipilih sebab dinilai sebagai wilayah yang paling mendekati model ideal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari diagram perolehan opini pada LKPD Kabupaten di Jawa Tengah dan DIY TA 2018 dan 2019 berikut:



(Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester I 2020 data diolah*)

Gambar 1.2 Opini LKPD Kabupaten di Jawa Tengah dan DIY TA 2018 dan 2019

Diagram diatas menunjukkan bahwa pada TA 2018, 96% LKPD kabupaten di Jawa Tengah dan DIY berhasil meraih opini WTP, kemudian meningkat menjadi 100% pada TA 2019. Selain memiliki capaian kualitas opini yang sangat bagus, banyak pula prestasi yang diperoleh pemerintah kabupaten di Jawa Tengah dan DIY pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Diantaranya adalah

Kab.Sleman, Kab.Bantul dan Kab.Kulonprogo yang memperoleh nilai A dari hasil evaluasi sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah (SAKIP) (BPK RI, 2019). Sementara Kab.Banyumas, Kab.Cilacap dan Kab.Wonogiri menerima nilai BB (Instektorat Provinsi Jawa Tengah, 2019). Dilansir dari website resmi pemerintah Kota Pekalongan, terdapat 15 pemerintah kabupaten di Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 yang menerima penghargaan atas diperolehnya opini WTP selama 5 tahun berturut-turut (Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020). Hal inilah yang memperkuat alasan dipilihnya LKPD kabupaten di Jawa Tengah dan DIY tahun anggaran 2018 dan 2019 sebagai subjek penelitian ini. Sebab diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pemerintah daerah lain agar dapat mencontoh strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meraih dan atau mempertahankan opini yang baik.

Penelitian mengenai faktor pemberian opini audit pada pemerintah daerah telah banyak dilakukan pada penelitian terdahulu, namun belum ditemui penelitian dengan fokus objek pemerintah kabupaten saja. Selain itu belum banyak penelitian mengenai faktor standar akuntansi pemerintah. Penambahan ketepatan waktu sebagai variabel moderasi juga dianggap sebagai pembaruan penelitian. Oleh karenanya peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efek Moderasi Ketepatan Waktu Pada Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan: Studi Pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap opini audit?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap opini audit?
3. Apakah tindak lanjut rekomendasi berpengaruh terhadap opini audit?
4. Apakah ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap opini audit?
5. Apakah ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap opini audit?
6. Apakah ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ditujukan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok bahasan sehingga penelitian tetap berjalan sesuai tujuan penelitian. Pembatasan masalah penelitian ini meliputi:

- 1) Objek penelitian adalah LKPD kabupaten di Jawa Tengah dan DIY tahun anggaran 2018 dan 2019.
- 2) Variabel opini audit didefinisikan dengan opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah, yakni WTP, WDP, TMP dan TW.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap opini audit.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap opini audit.
- c. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit.
- d. Untuk mengetahui moderasi ketepatan waktu pada pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap opini audit.
- e. Untuk mengetahui moderasi ketepatan waktu pada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap opini audit.
- f. Untuk mengetahui moderasi ketepatan waktu pada pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit.

### **2. Manfaat**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah wawasan seputar opini audit BPK dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya seputar ketepatan waktu yang menjadi variabel moderasi pada penelitian ini.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sekaligus masukan untuk pemerintah daerah kabupaten agar memperhatikan



standar akuntansi publik, sistem pengendalian internal, tindak lanjut rekomendasi, serta ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan dalam rangka memperoleh atau mempertahankan opini yang baik sebagai tanda akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan, telaah pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat deskripsi unsur-unsur penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi teoritis dan praktis, serta saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada opini audit. Banyaknya akun yang dikoreksi oleh BPK menandakan standar akuntansi pemerintah belum diterapkan secara konsisten dan maksimal, sehingga mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan opini yang baik.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh pada opini audit. Banyaknya temuan kelemahan sistem pengendalian internal membuat berkurangnya keandalan laporan keuangan dan berakibat pada semakin buruk opini audit yang akan diterima.
3. Tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh pada opini audit. Opini bukanlah kesimpulan terkait tindak lanjut rekomendasi saja, bergantung dengan tingkat materialitas rekomendasi dalam mempengaruhi keadaan.
4. Ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah pada opini audit. Ketepatan waktu membawa persepsi yang menambah keyakinan atas keandalan suatu laporan keuangan dengan menjamin kerelevanan informasi didalamnya.
5. Ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pada opini audit. Ketepatan waktu dapat menambah keyakinan akan keandalan informasi laporan keuangan yang merupakan tujuan diselenggarakannya sistem pengendalian internal.

6. Ketepatan waktu tidak memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi pada opini audit. Penelitian pada LKPD kabupaten di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan tepat waktu atau tidaknya penyetoran LKPD tidak memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini.

### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini berdasarkan sumber data sekunder saja sehingga data yang diolah terbatas karena hanya berdasarkan data yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.
2. Opini audit yang ada pada populasi penelitian terdiri dari WTP dan WDP, sehingga kurang merepresentatifkan opini audit secara keseluruhan.
3. Hasil *Adjusted R-Square* tanpa moderasi menunjukkan 0,202; artinya model hanya dapat menjelaskan opini audit sebesar 20,2% dan 79,8% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

### **C. Implikasi Teoritis dan Praktis**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan ketepatan waktu sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian opini dengan memperhatikan variabel yang memiliki pengaruh pada opini sebagai bahan untuk evaluasi kinerja.

#### **D. Saran**

Beberapa saran untuk penelitian mendatang sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah

Pemerintah daerah diharapkan lebih memberi perhatian pada penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta memperhatikan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. Digarapkan pula pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian dengan menambah periode atau wilayah penelitian agar hasil penelitian semakin mewakili kondisi yang sebenarnya. Dan diharapkan pula untuk dapat menambah variabel lain diluar variabel yang telah diteliti, misalnya tingkat pengungkapan laporan keuangan, tingkat kemandirian, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghaei Chadegani, A., & Yadollahy Farsani, L. (2019). Audit Quality, Auditor's Follow-up Recommendations (Emphasis on Specific Point Paragraph) and Auditor's Opinion. *Iranian Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 3(3), 77–85. <https://doi.org/10.22067/ijaaf.v3i3.89213>
- Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.362>
- Amani, N. S. (2018). Pengaruh Kompetensi, Sumber Daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit dan , Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Amyulianthy, R., Sayyidatun Ufairroh Ano, A., & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga.
- BPK RI. (2019). *DIY Terbaik Se Indonesia*. <https://yogyakarta.bpk.go.id/diy-terbaik-se-indonesia/>
- BPK RI. (2020). *BPK: Seluruh Pemerintah Provinsi Capai Opini WTP*. Bpk.Go.Id. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-seluruh-pemerintah-provinsi-capai-opini-wtp>
- BPKAD Kab. Banjar. (2017). *Akuntabilitas Pelayanan*. <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/01/akuntabilitas-pelayanan/>
- BPKP. (2011). *Sekilas SPIP*. <https://www.bpkp.go.id/>

<https://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>

- Cilya, D. D., Rantelangi, C., & Kusumawardani, A. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern (SPI), kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan terhadap opini audit atas laporan keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 2(3).
- Dhonal, R., Rahayu, S., & Yudi. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi pada Aparat Pemerintah Dinas Kabupaten Bungo). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3, 27–40.
- Farrar, D. E., & Glauber, R. P. (1967). *Multicollinearity in Regression Analysis : The Problem Revisited*. Review of Economic and Statistic.
- Febri Endra B.S. (2017). *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Zifatama Jawa.
- Fitriana, N., Anugerah, R., & Fitrioso, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Perundang-undangan dan Dana Insentif Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 123–135.
- Gainau, M. B. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. PT Kanisius.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamidayanti, L., & Wardani, M. K. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2019*, 2(2), 685. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i2.79>

- Hartini, R. F. (2019). Analisis Determinasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) [Universitas Muhammadiyah Magelang]. In <http://eprintslib.ummgl.ac.id>. [http://eprintslib.ummgl.ac.id/1726/1/14.0102.0093\\_BAB\\_I\\_BAB\\_II\\_BAB\\_III\\_BAB\\_V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/1726/1/14.0102.0093_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)
- HUMAS BPK RI. (2019). *Ketua BPK Apresiasi Peningkatan Kualitas LKPD*. <https://www.bpk.go.id/>. <https://www.bpk.go.id/news/ketua-bpk-apresiasi-peningkatan-kualitas-lkpd>
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester I 2019*. (n.d.).
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester I 2020*. (n.d.).
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Instektorat Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). Sukses Pangkas RP 1,2 Triliun, Jateng Diganjar Nilai A dari Kementerian PAN-RB. 2019. <https://inspektorat.jatengprov.go.id/17/detailpost/sukses-pangkas-rp-1-2-triliun-jateng-diganjar-nilai-a-dari-kementerian-pan-rb>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, Wi. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial behavior, agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S. (2021). The Influence Of Local Government Ccharacteristic And BPK Audit Opinion On The Financcial Performance Of

- District/City Governments In Province Jawa tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 40–55.
- Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. N. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi Sdm, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 643–670.
- King, M., Setiyawati, H., & Mappanyuki, R. (2019). The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control Towards Auditor Opinion Using The Application Of Government Accounting. *International Conference on Rural Development and Entrepreneurship*, 5(1).
- Kusumawati, D., & Ratmono, D. (2017). Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 177–191.
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana dalam UMKM)*. DEEPUBLISH.
- Lusiana, Djahhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180>
- Neli. (2019). 6 Pemda Terlambat Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2018. *SimadaNews*. <https://simadanews.com/6-pemda-terlambat-serahkan-lkpd-tahun-anggaran-2018/>
- Noviani, A., & Hendarsyah, D. (2020). Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 206–213. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.2477>
- Nusa, N. D., & Muslihah, S. (2021). Pengaruh Serapan Anggaran, Kepemimpinan Etis, Tindak Lanjut Temuan Bpk, Dan Keefektifan Audit Internal Pada Hasil



- Audit Lkpd. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 201–213. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/35936>
- Pamungkas, B., Ibtida, R., & Avrian, C. (2018). Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments' financial statements. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pratama, L. S. (2013). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perusahaan terhadap Timeliness Laporan Keuangan. *Universitas Diponegoro*.
- Putra, A. A. A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan Leverage Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah. *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2020–2034.
- Ragam Opini BPK*. (2020). [www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk](http://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk)
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279.

<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>

- Renwarin, F. D., & Sumtaky, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal ULET (Utility, Earning and Tax)*, III(71). <http://www.ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-ulet/article/view/75>
- Rosadi, S., Siyanto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan, Status Daerah dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 02, 2017, 03(02)*, 99–111.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode Penelitian*. CV Budi Utama.
- Rujakat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. CV Budi Utama.
- Safitri, N. luh K. S. A., & Darsono. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(1), 122–133.
- Saputra, Y., & Ariani, N. E. (2018). Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian dan Opini Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 712–724. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas>
- Sarwono, J. (2013). *Statistika multivariat Aplikasi Untuk Riset Dengan Microsoft Excel dan SPSS*. CV Andi Offset.
- Setyawan, D. A. (2021). *Hipotesis dan Variabel Penelitian*. Tahta Media Group.
- Sharma, S., Surand, R. ., & Gurarie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variabel. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 291–300.

- Suryani, F. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/8221/1/197121010.pdf>
- Suryanah, Setiyawati, H., & Mappanyuki, R. (2021). Influence of Government Accounting Standards and Internal Control System on the Achievement of Auditor Opinion. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 161, 156–166. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210121.023>
- Sutaryo, Naviantia, I. A., & Muhtar. (2020). Audit opinion on government financial report: Evidence from local governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129–144.
- Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan. (2020). *Pemkot Sukses Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut*. [Pekalongankota.Go.Id. https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-sukses-raih-opini-wtp-5-kali-berturuturut.html](https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-sukses-raih-opini-wtp-5-kali-berturuturut.html)
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/270/299>
- Widodo, O. P., & Sudarno. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Oengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2010), 1–9.
- Widodo, P., & Lutfillah, N. Q. (2018). Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1(2), 80–88.

Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1–10.

Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.